

DLH Audit Delapan Perusahaan Limbah

SEKUPANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman akan mengaudit limbah atau lingkungan serta investigasi tentang tumpahan minyak di Kepri. Investigasi ini direncanakan akan berlangsung pada 3-6 April mendatang.

Kepala DLH Kota Batam Herman Rozie mengatakan, ada delapan perusahaan yang nanti-

nya akan diperiksa. Enam perusahaan berdomisili di Batam dan dua di Kabupaten Karimun.

"Investigasi April mendatang bersama Tim Menko Kemaritiman, KLHK, Kemenhub, KKP, lembaga Migas dan Dinas DLH Provinsi Kepri dan Kota," ujarnya, Selasa (27/3).

Tim ini akan menindak kegiatan yang merusak lingkungan di Batam. "Penindakan pengrusakan lingkungan, kami ingin mencoba lebih intens. Ka-

lau dulu saya terbagi dua. Pagi di Perakimtan, siang DLH. Kalau ini kan saya sudah full di DLH. Tentu harus lebih intens," ujarnya. Menurut Herman, sejak ditunjuk menjadi Plt Kepala DLH lima bulan lalu, ia sudah memberhentikan beberapa kegiatan pemotongan lahan (cut and fill). Lokasinya tersebar di Tembesi dan Kaveling Seroja Kecamatan Sagulung, Kecamatan Nongsa, dan Marina Kecamatan Sekupang.

Penghentian dilakukan karena beberapa sebab. Pertama perusahaan punya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) tapi belum punya izin. Ada yang punya izin tapi pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan rekomendasi. Serta ada yang tak punya izin sama sekali.

Selain itu, alasan penghentiannya karena pemerintah meyakini kegiatan cut and fill ini men-

jadi salah satu penyebab banjir di Kota Batam. Tak sedikit perusahaan yang melakukan pemotongan lahan tanpa menghiraukan kondisi lingkungan.

"Karena cut and fill ini, tumpahan air lolos saja. Kalau saya prioritaskan yang lain, artinya Pak Yu (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) jalan sendiri. Sedangkan untuk penanganan banjir kami harus sinergi, satu gerak," katanya.

● iwan sahputra

Wali Kota Lantik Ulang 230 Pegawai

BATAM KOTA – Wali Kota Batam melantik 293 pegawai di lingkungan Pemko Batam di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Selasa (27/3). Di antara pegawai yang dilantik, ada 230 orang yang dilantik ulang karena Surat Keputusan (SK) pelantikan hilang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Batam, M Syahir mengatakan, ada 293 pegawai yang dilantik yaitu 63 orang honoror K2 yang sudah laporan pertanggungjawaban dan 230 pegawai yang kehilangan SK PNS. “Ada yang pengangkatan mulai 2001 ke atas. Biasanya karena kelalaian pribadi seperti rusak atau hilang,” ujarnya.

Berita acara pengangkatan ini, sambungnya, sangat perlu bagi seorang aparatur negara sebagai lampiran dalam pengurusan dokumen lainnya. Di antaranya, kartu pegawai, Taspen dan pengurusan pensiun sebagai bukti fisik pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. “Pada masa lalu tidak mengurusnya. Pentingnya berita acara untuk lengkapi dokumen pribadi masing-masing

PNS,” kata Sahir. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, bagi PNS yang sudah disumpah tetapi tak melaksanakan tugasnya itu adalah salah. Karena hanya menghabiskan uang negara. “Kehebatan suatu negara itu berada pada PNS,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada semua PNS memberikan tenaga dan waktunya untuk negara. Kepentingan rakyat itu nomor satu. Pembagian kerja sekarang sudah jelas. “Ayok sama-sama bantu saya untuk memajukan Kota Batam dan mengutamakan rakyat. Jika saya sebentar lagi pensiun, bapak sama ibu jalan masih panjang. Ini demi kepentingan rakyat Kota Batam. Mari kita berjuang,” katanya. Rudi juga membahas utang yang ada selama proses pelebaran jalan yang selama ini sudah dilakukan. Tetapi dalam hal ini ia juga berjanji pasti selesai sebelum tahun 2020 nanti.

“Sebagai penutup saya menyampaikan ada yang suka dan tak suka dengan pelebaran jalan. Tapi setelah di survei dari 100 persen, Insya Allah hanya 1 persen saja yang tak suka,” kata Rudi.